

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Jamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stetsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- B. D. Sri Marsita, Sri Humana, 2015, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil*, Jakarta Selatan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bernard L. Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Pernada Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Elwi Danil, 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Revika Aditama.
- H. R. Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black Law Dictionary*, St. Paulmin: West Publishing Company.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kevin I. Mirror dan J. T. Morrison, 1996, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice International Perspective*, New York: Criminal Justice-Press and Krueger Publications.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kuat Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum Faculty of Law Universitas Jendral Soedirman. Vol. 12. No. 3.
- Lawrence M. Friedman, 2013, *Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Luhut MP Pangaribuan, 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- M. Taufik Makaro, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM.
- Muhammad Djafar Saidi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi Revisi, Cetakan keempat, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip.
- P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Bekasi: Pena Mukti.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Soepomo, 1981, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alurni.
- Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Surachman dan Andi Hamzah, 1995, *Jaksa Diberbagai Negara; Peranan Dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media.

- Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorat.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yunizar Wahyu Tristanto, 2018, *Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan Di Indonesia*, AHKAM Jurnal Hukum Islam. Vol. 6. No. 2.

Artikel dan Jurnal:

- Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011.
- Bambang Waluyo, 2014, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Email, *Jurnal Yuridis*.
- Budi Suhariyanto, 2016, *Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara*, *Jurnal Rechtsviinding*, Vol. 5 No. 3 Desember.
- Desly S. Mokobimbing, 2015, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 3/Mei/2015, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:seWD852laHgJ:ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/8072/7633+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.
- Dwidja Priyatno, 2007, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, *Jurnal Advokasi LAHA*, Vol. 3, Ed. VIII, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA).

- Henny Saida Flora, 2018, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Indonesia*, UBELAJ Jurnal, Volume 3, Issue 2.
- I Gusti Agung Angga Mahavira; I Dewa Made Suartha; I Wayan Bela Siki Layang; *Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif Indonesia*, E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Univeristas Udayana. Vol. 07 No. 03, Mei 2018.
- I. Tajudin dan Nella Sumika Putri, 2015, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan*, PADJAJARAN Jurnal, Volume 2, Nomor 1.
- Lorent Pradini Imso Sanusi, 2019, *Pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Muhammad Gempa Awaljon Putra, 2018, Dahlan dan Mahfud, "*Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2. No. 2. Agustus.
- Muhamad Iqbal, *Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 Maret 2018.
- Nabil Atta Samandari, Wila Chandrawila S dan Agus H. Rahim, 2016, *Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik*, Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 2. No. 2.
- Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Pendapat Ismansyah sebagaimana dikutip Puteri Hikmawati, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 10, No. 1, Juni 2019.

Pendapat Nizam Burhanuddin sebagaimana dikutip oleh Merdiansa Paputungan, *Diskursus Kewenangan Audit BPK Terhadap Keuangan BUMN (Perseroan) Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013*, Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Romli Atmasasmita, *Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Media Hukum Media Informasi Masyarakat Hukum, Vol 2 No.8, 22 November 2003.

Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2, Agustus 2019.

Yasmirah Mandasari Saragih, *Peranan Jaksa Dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Research Sains, Vol. 1 No. 3 Oktober.

Yeni Handayani, *Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum*, Jurnal Rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online.h.2/https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/OPINI%20JAKSA%20AGUNG%20DAN%20PENGESAMPINGAN%20PERKARA%20DEMI%20KEPENTINGAN%20UMUM(2).pdf, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.

Yusona Piadi, dan Rida Ista Sitepu, 2019, *Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal *Recthen*: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol. 1.

Website:

Barda Nawawi Arief, 2013, *Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Bahan-1 Pelatihan Hakim Militer*, Surabaya, http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/en/files/Materi/MIL01/MIL_BA_RDA_TPP.pdf, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2021, Pukul 23:07 WITA.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>, diakses pada tanggal 21 Maret 2021

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2021, Pukul 23:19 WITA.

LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah)*. <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2021.

Rosmala Dewi Sakti Prawira, *Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jurnal Hukum Progresif, 2016, (<https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progres-if.v10i2.190>), diakses pada 22 Maret 2021.

<http://aai.or.id/v3/index.php?option=com.content&view=article&id=186:kebijakan-restorative-justice-masalah-tindak-pidana-korupsi&catid=87&itemid=550&showall=1&limitstart>, diakses pada 23 Juni 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d85bee63862b/menggagas-peradilan-korupsi-yang-lebih-menguntungkan-keuangan-negara/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021.

Wawancara/Interview:

Interview dengan Bapak Hazairin, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Poso pada tanggal 13 Mei 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHPidana*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang *Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang *Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang *Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi*

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 002/A/Ja/1/2005 tentang *Perencanaan Strategi Dan Rencana Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2005*

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tertanggal 18 Mei 2010 perihal *Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 perihal *Petunjuk*

Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-345/F/Fjp/05/2018 tertanggal 04 Mei 2018 perihal *Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas*